

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Muhammad Iqbal, dkk. 2017. Laporan Magang PT. Ispat Indo Tahun 2017. Surabaya: Jurusan Kesehatan Lingkungan Surabaya. Politeknik Kesehatan Surabaya
- Anisa, 2018. Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Jasa Tukang Gigi Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. *Jurnal Cepalo*, Vol 2 No 1
- Aries Harianto Bambang Sunggono, 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju
- Badudu-Zain, 2018. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Baihaqi, 2019. Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan. *LIBRIA*, Vol 8, No 1.
- Dara. 2021. Analysis of Victim Cases Dental Technician in Health Law in Indonesia. *Journal Of Social Science*, ISSN: P 2720-9938
- Dedi Ansari Harahap, 2018. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Devi Dharmawan, Ivonne Jonathan, 2019. Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, Volume 8, No 1, Mei 2019.
- Dicky, 2022. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Tukang Gigi Terhadap Dugaan Malpraktik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol 2 No 3.
- Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar, 2020. "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia daalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa," *Jurnal Kedokteran Indonesia* Vol 6, no. 1
- Hartini Retnaningsih, 2018. "Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* Vol 6, no. 2,
- Hasaziduhu Moho, 2019. Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, Vol 13 No 1.

- Hernadi Affandi, 2019. "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara," *Jurnal Hukum Positum* 4, no. 1,
- Jum Anggraini, 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak No: HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tukang di Bidang Kesehatan. Tahun 2011.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cetakan Ketiga Puluh Delapan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Maylina RR, 2015. *Profil Usaha Tukang di Kota Padang*, Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Muhammad Iqbal, 2017. *Jurnal Ilmiah Eksistensi Tukang Gigi Sebagai Pelayan Kesehatan Tradisional di Tinjau dari Hukum Kesehatan Studi di Kota Mataram*. Thesis, Universitas Mataram.
- Muhammad Sadi, 2017. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Kencana
- Nurlina, 2022. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tukang Terhadap Kerusakan Gigi Konsumen Dalam Pemasangan Behel. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol2, No 3
- Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun 2022
- Profil PDGI
- Revita, 2020. Al Imron. The Protection for Consumers of Dental Prosthesis Care-Palarch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17(3)
- Sondang P. Siagian. 2018. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahyu Kurniawati dan Riris Diana Rachmayanti, 2018. "Identifikasi Penyebab Rendahnya Kepesertaan JKN pada Pekerja Sektor Informal di Kawasan Pedesaan," *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* Vol 6, No. 1
- Yani, Kumasturyani, 2018. Tanggung Jawab Hukum Kesehatan Ahli Gigi Terhadap Tindakan Malpraktik. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 3 No 6.

**Perundang-Undangan:**

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor: HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tukang di Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Permenkes Nomor 34 Tahun 2014

Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

**Wawancara:**

Wongkotomo, S.K.M, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Poso, Wawancara Tanggal 1 Oktober 2023

Abdul Haris, S.H, M.H., Pakar Hukum tentang Perlindungan Hukum dan Konsumen Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso, Wawancara Tanggal 2 Oktober 2023

drg. Lutfiah Sahabuddin, M.K.M, Ketua Organisasi Profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Palu (Koordinator Wilayah Kabupaten Poso), Wawancara Tanggal 3 Oktober 2023

Irham Saide, Tukang Gigi Kelurahan Sawidago Kabupaten Poso, Wawancara Tanggal 4 Oktober 2023

**Internet:**

[Http://www.minews.id/viral/viral-gegara-tukang-gigi-abal-wanita-alami-infeksi-hingga-ditangani-4-dokter-spesialis](http://www.minews.id/viral/viral-gegara-tukang-gigi-abal-wanita-alami-infeksi-hingga-ditangani-4-dokter-spesialis)

[Https://www.kompasiana.com](https://www.kompasiana.com)

Perbedaan Tukang dengan Klinik Kecantikan,  
<http://digilib.unila.ac.id/12979/12/BAB%20II.pdf>.

Perbedaan Tukang dengan Klinik Kecantikan, <https://highlight.id/perbedaansalon-klinik-kecantikan-treatment-layanan/>

